



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI serta para Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	10 (Sepuluh)
Hari/Tanggal	:	Selasa, 30 Januari 2018
W a k t u	:	Pukul 10.25 s.d 14.45 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PD), didampingi oleh: 1. Bowo Sidik Pangarso (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG); 2. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P. Gerindra).
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas mengenai Kinerja Perusahaan (Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan)
Hadir	:	19 dari 49 Anggota Komisi VI DPR RI. 1. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI; 2. Para Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero).

I. PENDAHULUAN

1. RDP Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI serta para Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero) dibuka pada pukul 10.25 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda RDP pada hari Selasa, 30 Januari 2018 dalam rangka membahas mengenai Kinerja Perusahaan (Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan).

3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI serta para Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero) untuk menjelaskan mengenai Kinerja Perusahaan (Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan).
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI serta para Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI agar melakukan koordinasi dengan kementerian terkait supaya menugaskan PT Sucofindo (Persero), PT Surveyor Indonesia (Persero), dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dalam kegiatan uji kelayakan, jasa survey, dan konsultan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pekerjaan strategis nasional, termasuk proyek ketahanan dan pengamanan negara.
2. Komisi VI DPR RI meminta Menteri BUMN melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan agar PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) mendapat pengakuan internasional dengan memberikan pelimpahan kewenangan statutoria dari Kementerian Perhubungan yang meliputi kegiatan pemeriksaan dokumen, inspeksi, survey, audit, dan sertifikasi yang terkait dengan keselamatan maritim, perlindungan terhadap lingkungan laut, kesejahteraan pelaut, pelaksanaan audit sistem manajemen keselamatan maupun sistem manajemen keamanan kapal dan pelabuhan.
3. Komisi VI DPR RI akan mengagendakan rapat untuk membahas secara khusus mengenai penyelesaian restrukturisasi BUMN yang tidak sehat.
4. Komisi VI DPR RI meminta penjelasan secara tertulis mengenai merger dan holding BUMN di bidang jasa survey.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.45 WIB.